KILAS BALIK KONFLIK AMBON:
AKAR PERMASALAHAN DAN RESOLUSI KONFLIK

Oleh: Yappi Manafe
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 1982

PENGANTAR

Ambon adalah nama sebuah kota dan pulau, sedangkan istilah "orang Ambon" menggambarkan suatu wilayah budaya yang mencakup banyak pulau di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia. Pulau-pulau tersebut meliputi Ambon, Saparua, Haruku, Buru, Manipa, Nusalaut, dan Seram. Sejak abad keenam belas, penduduk asli Ambon secara relatif terbagi hampir merata antara umat Kristen dan Muslim.[2] Sebagian besar dari kedua komunitas tersebut tinggal di negeri atau desa yang terpisah, dan bahkan di desa-desa yang penduduknya bercampur, mereka cenderung tinggal di kampung atau lingkungan permukiman yang terpisah. Selain itu, banyak pendatang etnis Buton dari Sulawesi Tenggara, sebuah pulau besar di sebelah barat Ambon, serta etnis Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan, telah menetap di kampung-kampung mereka sendiri. Sebagian besar pendatang tersebut beragama Islam, dan mereka mendominasi perdagangan eceran berskala kecil serta jaringan transportasi.

Ketegangan antara umat Muslim dan Kristen di Provinsi Maluku telah meningkat selama beberapa dasawarsa, sebagai akibat dari melemahnya pengaruh mekanisme otoritas tradisional, masuknya para pendatang, serta proses "penghijauan" atau apa yang dipersepsikan sebagai Islamisasi pemerintah pusat di Jakarta. Pecahnya kekerasan antarkomunitas di berbagai wilayah Indonesia setelah pengunduran diri Presiden Soeharto pada Mei 1998 semakin meningkatkan rasa saling tidak percaya di antara kedua komunitas tersebut. Baik sistem persekutuan pela maupun kewibawaan para pemimpin tradisional setempat, yang disebut raja, telah mengalami pelemahan jauh sebelum konflik yang terjadi saat itu meletus. Sistem pela mengalami pukulan yang mematikan pada masa kemerdekaan Indonesia tahun 1949, ketika kelompok elite politik yang sebagian besar beragama Kristen, banyak di antaranya memiliki hubungan militer atau administratif dengan pemerintahan kolonial Belanda, memilih untuk mendirikan Republik Maluku Selatan (RMS), daripada bergabung dengan negara Indonesia yang baru terbentuk. Perang singkat kemudian terjadi, yang berakhir dengan kekalahan RMS pada Desember 1950. Selama konflik tersebut, banyak desa Muslim dibumihanguskan oleh pasukan RMS, dan kehancuran itu tidak pernah dilupakan. Selain perang tersebut, arus kedatangan pendatang yang terus berlangsung dari berbagai wilayah Indonesia mengakibatkan terbentuknya permukiman-permukiman baru yang sepenuhnya berada di luar sistem pela, yang hanya berlaku bagi orang Ambon beragama Kristen dan Muslim.

Pada tahun 1974, dengan disahkannya undang-undang baru tentang pemerintahan daerah, kepemimpinan lokal secara bertahap berubah dari sistem yang didasarkan pada klan, yang diwakili oleh raja-raja Ambon, menjadi sistem yang didasarkan pada wilayah teritorial dengan kepala desa sebagai jenjang paling bawah dalam struktur administrasi Indonesia. Dalam satu pengertian, sistem baru ini lebih egaliter karena membuka kemungkinan bagi komunitas pendatang dari etnis Bugis, Buton, dan Makassar untuk memperoleh perwakilan, dan beberapa calon kepala desa berusaha menarik suara dari komunitas-komunitas tersebut. Di sisi lain, perubahan ini berarti bahwa banyak kepala desa tidak memiliki kewibawaan yang dahulu dimiliki oleh para raja, dan ketika konflik pecah, semakin sedikit orang di tingkat lokal yang mempunyai kemampuan untuk menghentikannya. Arus masuk pendatang juga menggeser keseimbangan demografis sehingga menguntungkan kelompok Muslim. Para pendatang dari Sulawesi telah datang untuk berdagang di Ambon sejak abad keenam belas, tetapi migrasi meningkat tajam pada tahun 1970-an, dan bersamaan dengan itu meningkat pula ketegangan dengan penduduk Ambon Etnis Bugis, yang secara tradisional bermukim di sepanjang pesisir dalam komunitas-komunitas tersendiri, mulai menetap di Kota Ambon, menggantikan para pedagang lainnya, mengambil alih sektor transportasi, dan menurut pandangan sebagian orang Ambon, menciptakan kawasan permukiman kumuh serta turut meningkatkan kejahatan perkotaan. Orang Bugis juga mulai menunjukkan pengaruh politik mereka pada tahun 1980-an dan 1990-an melalui organisasi-organisasi etnis Bugis yang terkoordinasi dengan baik, yang tidak dapat diabaikan oleh para politisi lokal tanpa menanggung risiko politik.

Kebangkitan politik mereka berlangsung bersamaan dengan apa yang dipandang oleh orang Ambon Kristen sebagai kebijakan tindakan afirmatif yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat pada awal tahun 1990-an untuk mengatasi marginalisasi pengusaha Muslim dibandingkan dengan pesaing mereka dari etnis Tionghoa. Apa pun alasan yang mendasari kebijakan tersebut di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim, di Ambon kebijakan itu menimbulkan kemarahan dan frustrasi di kalangan umat Kristen, karena mereka melihat bahwa bukan hanya peluang ekonomi, melainkan juga pekerjaan sebagai pegawai negeri semakin banyak diberikan kepada umat Muslim, yang sebagian besar merupakan pendatang. Ketika orang Kristen secara bertahap tersingkir dari jabatan-jabatan yang secara tradisional mereka duduki dalam pemerintahan daerah, profesi guru, dan kepolisian, mereka beralih ke sektor swasta, tetapi kemudian mendapati bahwa kelompok-kelompok pendatang, antara lain dari Sulawesi, telah menguasai pasar. Orang Kristen mulai merasa bahwa keberadaan mereka secara politik, ekonomi, dan budaya di Ambon sedang terancam. Dengan demikian, hubungan antarkomunitas sebenarnya sudah tidak baik bahkan sebelum kekerasan meletus, dan setiap orang di Ambon menceritakan tentang perkelahian yang berulang kali terjadi antara kampung-kampung Muslim dan Kristen. Lingkungan-lingkungan permukiman tersebut tampaknya hidup dalam keadaan permusuhan yang nyaris tidak dapat dibendung, tetapi perkelahian yang sering terjadi itu biasanya dapat diselesaikan dengan cepat.

Namun, suasana berubah secara nyata menjadi semakin buruk setelah serangkaian insiden antarkomunitas, yang kemungkinan sengaja diprovokasi, meletus di berbagai wilayah Indonesia lainnya pada akhir tahun 1998. Pada tanggal 22 November 1998, perselisihan antara kelompok-kelompok pemuda setempat mengenai sebuah tempat perjudian, yang menggunakan orang-orang Ambon Kristen sebagai petugas keamanan, berkembang menjadi kerusuhan antarkomunitas ketika tersebar desas-desus bahwa orang-orang Ambon telah menghancurkan sebuah masjid setempat. Para pemuda Muslim yang kemudian diangkut dengan truk ke wilayah tersebut membakar sekitar dua lusin gereja. Pada tanggal 30 November, sebuah kongres pemuda Kristen di Kupang, Timor Barat, menyelenggarakan pertemuan yang dilanjutkan dengan aksi pawai untuk memprotes pembakaran gereja-gereja tersebut. Di tengah berlangsungnya pawai, muncul sebuah truk yang mengangkut sekelompok pemuda yang tampaknya tidak dikenal oleh siapa pun. Dalam waktu singkat, sebuah permukiman etnis Bugis, termasuk masjidnya, dibakar hingga rata dengan tanah. Kedua insiden tersebut secara luas diyakini telah diprovokasi oleh pihak yang akan memperoleh keuntungan dari kerusuhan sipil. Pemerintah daerah memperingatkan para pemimpin agama di seluruh negeri, menjelang perayaan Natal dan bulan puasa umat Muslim pada Desember 1998, agar mewaspadai provokasi dan tidak mudah terpengaruh oleh desas-desus.

Salah satu pertemuan para pemimpin agama diselenggarakan di Ambon pada pertengahan Desember. Menurut salah seorang peserta, suasana pertemuan begitu tegang sehingga para peserta Muslim meninggalkan pertemuan dengan keyakinan bahwa pihak Kristen telah memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menyingkirkan para pendatang Muslim dari provinsi itu. Para pemimpin dari kedua komunitas kemudian membentuk “posko”, sebuah akronim yang dapat diartikan sebagai “pos komunikasi” atau “pos komando”, bergantung pada seberapa militan pihak yang memberikan definisi tersebut. Pos-pos ini, yang didukung oleh jaringan masjid dan gereja yang saling terhubung melalui telepon seluler atau telepon biasa, dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada komunitas masing-masing mengenai setiap kemungkinan bahaya provokasi. Namun, dalam kenyataannya, begitu perkelahian pecah, pos-pos tersebut justru turut berfungsi menyebarkan desas-desus dan memobilisasi komunitas-komunitas yang bersangkutan. Dalam suasana seperti itu, tidak diperlukan pemicu yang besar untuk menimbulkan kekerasan yang meluas, meskipun bagaimana tepatnya kekerasan tersebut bermula masih menjadi bahan spekulasi.

AKAR KONFLIK

Awal mula terjadinya konflik di Maluku yakni adanya target kekerasan untuk para pendatang Muslim dari Bugis, Buton dan Makassar. Setelah adanya perpindahan penduduk besar- besaran, konflik mulai menyebar ke wilayah luar dari Maluku. Pecahnya konflik diperparah dengan adanya rumor seputar simbol keagamaan, seperti terjadinya serangan pada masjid ataupun gereja. Konflik di Maluku ini sempat mereda karena adanya PEMILU pada Mei 1999.

Hingga akhirnya pada Juli 1999 pemilihan di Ambon dimenangkan oleh partai PDIP, pengumuman kemenangan ini berakhir dengan kekerasan dikarenakan kemenangan PDIP seperti halnya kemenangan umat Kristen. Hal ini membuat masing-masing umat beragama yang ada di Maluku untuk melakukan pertahanan diri dan melakukan kekerasan kepada siapapun dari agama yang berbeda. Puncak konflik yaitu adanya pembantaian Tobelo dan serangan terhadap Gereja Silo yang berada di pusat Kota Ambon pada tanggal 26 Desember 1999. Gereja ini merupakan salah satu Gereja Protestan Maluku yang terbesar dan terbakar habis pada hari selesai perayaan Natal. Sementara itu, pada hari yang sama umat Muslim di Masjid desa Tobelo terburnuh hampir 800 orang oleh umat Kristen. Adanya serangan ini membuat antara kedua umat tersebut terlibat lebih jauh dalam konflik kekerasan, sampai- sampai para apparatpun tidak dapat menanganinya. Setelah sekian lama ketenangan terjadi di Maluku, pada bulan September 2011 Ambon Kembali mengalami kerusuhan yang disebabkan oleh kematian tukang ojek beragama Muslim yang Bernama Saiman di Kawasan komunitas Kristen, dalam hal ini masyarakat sangat mudah sekali untuk diprovokasi, hanya sebatas pesan masuk yang menyebar, pesan tersebut berisi bahwa Saiman telah mati dibunuh oleh orang Kristen.

APAKAH KONFLIK YANG TERJADI DIPROVOKASI?

Di luar Ambon, sebagaimana tercermin dalam majalah-majalah berita mingguan utama di Indonesia dan pernyataan para pemimpin oposisi politik, terdapat keyakinan yang hampir menyeluruh bahwa kekerasan di Ambon merupakan salah satu dari sejumlah kerusuhan di berbagai wilayah Indonesia yang sengaja dipicu oleh orang-orang yang setia kepada mantan Presiden Soeharto, keluarganya, sekelompok perwira militer yang tidak puas, atau gabungan dari semuanya. Kerusuhan yang dimaksud meliputi penembakan terhadap empat mahasiswa dan kerusuhan berikutnya di Jakarta pada Mei 1998 yang mendahului pengunduran diri Soeharto; pembunuhan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada paruh kedua 1998; bentrokan di Semanggi, Jakarta, pada 13 November antara mahasiswa dan anggota milisi sipil pro-pemerintah yang dibentuk oleh militer; kekerasan antarkomunitas di Ketapang, Jakarta, pada 22 November; kekerasan antarkomunitas di Kupang, Timor Barat, pada 30 November; serta bentrokan antarkomunitas di Sambas, Kalimantan Barat, pada Januari dan Februari 1999. Upaya yang tidak berhasil untuk memicu kerusuhan sekitar berakhirnya bulan puasa umat Islam juga dilaporkan terjadi di Manado, Sulawesi Utara, dan Malang, Jawa Timur. Tujuan para provokator yang diduga terlibat itu disebut-sebut untuk mengganggu upaya penyelenggaraan pemilihan umum nasional yang dijadwalkan pada 7 Juni dan memaksa pemerintah menetapkan keadaan darurat agar militer Indonesia dapat kembali berkuasa. Di Ambon, para pendukung teori ini berpendapat bahwa pihak yang memicu kerusuhan adalah sekelompok preman asal Ambon yang berbasis di Jakarta dan mempunyai hubungan dengan keluarga Soeharto serta perwira-perwira militer yang tersisih setelah Soeharto mundur.

Teori kedua, yang banyak diyakini para pemimpin Muslim di Ambon, menyatakan bahwa kekerasan tersebut diprovokasi secara lokal oleh orang-orang Kristen yang tidak puas atas menurunnya pengaruh mereka dan kemudian meminta bantuan para pendukung gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). Menurut teori ini, tujuan mereka adalah mengembalikan orang-orang Kristen ke posisi dominan sebelumnya dan mengurangi jumlah penduduk Muslim melalui serangan terhadap para pendatang Muslim. Teori ketiga, yang merupakan gabungan dari dua teori pertama, menyatakan bahwa para perwira militer yang tidak puas mengerahkan aktivis RMS untuk memprovokasi kekerasan, karena mengetahui bahwa umat Muslim setempat akan bereaksi sebagaimana yang terjadi dan meyakini bahwa orang-orang Kristen bekerja sama dengan RMS untuk mengusir mereka. Sampai sejauh ini, belum ada bukti penentu yang meyakinkan membuktikan ataupun membantah teori-teori tersebut. Namun, tuduhan mengenai adanya provokasi sangat serius dan telah dikemukakan oleh pejabat-pejabat tinggi Indonesia, termasuk Panglima Angkatan Bersenjata, sehingga tuduhan tersebut harus diselidiki jauh lebih sungguh-sungguh daripada yang telah dilakukan hingga kini. Polisi dan militer menyatakan bahwa mereka tidak menemukan petunjuk dalam semua kasus besar tersebut. Memang, mereka telah melakukan beberapa penangkapan dan sebagian orang yang ditangkap kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan, tetapi mereka hanyalah pelaku-pelaku kecil.

TEORI PREMAN

Sejak kekerasan di Ambon meletus, beredar desas-desus bahwa para provokator adalah sejumlah tokoh dunia preman Ambon yang terlibat dalam kerusuhan antarkomunitas besar di Ketapang, Jakarta, pada 22 November. Bentrokan Ketapang menyebabkan gelombang pembakaran gereja oleh massa yang diduga bertindak berdasarkan kabar bahwa ratusan petugas keamanan Kristen asal Ambon di sebuah kasino perjudian besar di daerah itu telah menghancurkan masjid setempat. (Para penyelidik hak asasi manusia Indonesia menemukan bukti bahwa sejumlah truk membawa pemuda, sebagian dibayar, untuk ikut dalam kekerasan tersebut, tetapi masih belum jelas siapa yang mengorganisasi mereka dan mengapa.) Dari tiga belas orang yang tewas, beberapa adalah orang Ambon, demikian pula sebagian besar dari 180 orang yang ditangkap segera setelah kekerasan itu. Belum ada bukti kuat bahwa orang-orang Ambon dari Jakarta terlibat langsung dalam konflik, meskipun para perwira tinggi militer mengisyaratkan bahwa bukti tersebut ada. Komandan satuan militer dari Sulawesi Selatan, Mayor Jenderal Suaidi Marasabessy, yang juga seorang Muslim Ambon, mengatakan bahwa preman Jakarta bertanggung jawab atas pecahnya kekerasan di Ambon. Pernyataan itu diulangi Mayor Jenderal Amir Sembiring, komandan wilayah yang mencakup Maluku, yang mengatakan bahwa ia menerima laporan dari komandan Maluku bahwa provokator yang beroperasi dalam kelompok-kelompok kecil telah menghasut masyarakat. Memang benar bahwa ratusan orang Ambon yang pernah bekerja di kawasan Ketapang kembali ke Ambon pada Desember.

Namun, ada penjelasan yang masuk akal atas kepulangan mereka, termasuk kenyataan bahwa kasino tersebut telah dihancurkan dan warga setempat memperingatkan bahwa setiap orang Ambon yang kembali ke lingkungan itu akan dibunuh. Puluhan orang baru saja dibebaskan dari tahanan dan mungkin tidak ingin tetap tinggal di Jakarta. Kenyataan bahwa ratusan orang kembali ke Ambon dalam beberapa minggu sebelum kerusuhan tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya provokasi. Namun, para preman itu mungkin membawa perseteruan mereka sendiri ke kampung halaman. Sebagian besar yang kembali setia kepada salah satu dari dua pemimpin kelompok, Ongen Sangaji, koordinator Gerakan Mahasiswa Muslim Maluku di Jakarta, dan Milton Tua Kota, seorang Kristen. Kelompok Ongen Sangaji sebagian besar terdiri atas Muslim meskipun juga mencakup beberapa orang Kristen. Pengikut Milton hampir seluruhnya Kristen. Keduanya merupakan pesaing sengit, dan Milton menikahi mantan istri Ongen. Mereka bersaing memperebutkan pengaruh dalam keluarga Soeharto. Hubungan Ongen adalah dengan Bambang Soeharto, salah satu putra mantan Presiden Soeharto, sedangkan Milton dikatakan lebih dekat dengan putri sulungnya, Siti Hardiyanti Rukmana, yang lebih dikenal sebagai Tutut. Ketika kekerasan Ketapang meletus, Ongen jelas lebih berhasil daripada Milton, tetapi sumber-sumber di Ambon mengatakan bahwa persaingan antara pengikut kedua tokoh itu mungkin turut menyulut kekerasan Muslim–Kristen. Namun, tuduhan keterlibatan preman lebih jauh daripada itu. Abdurrahman Wahid, pemimpin oposisi sekaligus pemimpin organisasi Muslim moderat Nahdlatul Ulama (pada masanya), menimbulkan kehebohan pada awal Februari ketika mengemukakan bahwa orang yang secara pribadi bertanggung jawab atas kerusuhan itu adalah Yorrys Raweyai, pemimpin kelompok preman bayaran yang dikenal sebagai Pemuda Pancasila. Yorrys diketahui dekat dengan keluarga Soeharto, dan Pemuda Pancasila sering digunakan sebagai alat untuk menjamin kemenangan dalam kampanye Golkar. Ia dipanggil polisi untuk diperiksa, tetapi membantah keterlibatan apa pun dan mengatakan bahwa Pemuda Pancasila sangat lemah di Ambon. Kemudian Ongen Sangaji sendiri tampil. Sebagai anggota Pemuda Pancasila, ia banyak dikutip mengatakan bahwa 604 preman Ambon telah kembali ke Maluku dan bahwa orang yang membayar mereka adalah Yoseano Waas, anggota parlemen nasional asal Ambon. Menurut Ongen, anak buah Waas bekerja sama dengan orang-orang Kristen di Ambon untuk menyerang umat Muslim, dan salah seorang pemimpin mereka adalah Sadrakh Mastamu, kepala C & C Amusement Center di Ketapang. Ongen mengatakan kepada tabloid Tekad bahwa lima belas anak buah Mastamu tewas di Ketapang dan bahwa saudaranya melihat Mastamu menyerang umat Muslim di Ambon. Waas membantah tuduhan tersebut dan mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Tekad (sebuah tabloid yang terbit di Jakarta dan aktif memberitakan konflik Ambon pada masa itu). Sementara itu, sumber-sumber Kristen mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa Ongen Sangaji terlihat di Ambon pada Februari dan bertanggung jawab memasang poster-poster di sekitar kota yang menyerukan perang suci (jihad) melawan orang-orang Kristen di sana, serta membantu mengorganisasi sukarelawan Muslim dari wilayah lain di Indonesia untuk bergabung dalam perang.

Sumber-sumber ini menuduh Ongen bekerja sama dengan seorang perwira militer pensiunan di Ambon, Brigadir Jenderal Rustam Kastor, yang merupakan penghubung di Ambon bagi sekelompok perwira yang tidak puas di bawah Mayor Jenderal Kivlan Zein. Dengan demikian, teori preman kembali pada dugaan adanya kelompok perwira militer yang bertindak sendiri dan memiliki hubungan dengan keluarga mantan presiden. Perlu dicatat bahwa dari lebih dari seratus orang yang ditahan sehubungan dengan konflik tersebut, tidak seorang pun merupakan preman dari Jakarta. Hingga 10 Maret, seorang Kristen dan seorang Muslim telah dituduh melakukan penghasutan, tetapi tidak ada alasan untuk meyakini bahwa salah satu dari mereka beroperasi melampaui tingkat yang sangat lokal.

PENJELASAN SEPARATIS

Sejak awal, para pemimpin Muslim menuduh gerakan RMS berada di balik kekerasan dan mendukung orang-orang Kristen. Sebagai contoh, pada 28 Januari, Yusuf Rahimi, seorang pemimpin komunitas Muslim Ambon di Jakarta, mengadakan konferensi pers bersama ketua organisasi politik Muslim konservatif yang berbasis di Jakarta, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI). Dalam konferensi pers itu, Rahimi mengatakan bahwa dua faktor yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut adalah RMS dan "kelompok politik yang frustrasi terhadap perkembangan Islam di Ambon." Ia menyebut sejumlah laporan penampakan bendera RMS pada hari-hari pertama kerusuhan, pernyataan pemimpin gerakan itu di Belanda, serta teriakan dukungan terhadap RMS yang terdengar selama pertempuran. Para pemimpin Kristen menolak kemungkinan bahwa RMS memainkan peran penting. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada 27 Januari 1999 oleh para pemimpin Katolik dan Protestan menyatakan: Reaksi masyarakat Kristen terhadap peristiwa ini (pecahnya kekerasan pada 19 Januari) sama sekali tidak didorong oleh kepentingan politik tertentu, yaitu (tidak benar) bahwa RMS berada di balik kekerasan di Ambon dan daerah sekitarnya sebagaimana dikemukakan oleh ketua KISDI dalam siaran SCTV pukul 06.00 pada 21 Januari 1999. Cara isu RMS dilontarkan oleh ketua KISDI menyiratkan bahwa RMS identik dengan agama Kristen di Maluku, padahal kenyataannya RMS tidak identik dengan agama Kristen, dan masyarakat Kristen tidak pernah dan tidak akan pernah memberi ruang bagi RMS untuk tumbuh dan berkembang. Isu RMS dimaksudkan untuk menciptakan konflik antara militer dan umat Kristen di Maluku serta mengalihkan perhatian dari penyebab sebenarnya kekerasan yang meletus di Batumerah dan Silale (Waihaong) dan dengan begitu cepat menyebar ke tempat-tempat lain. Seorang pendeta mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa bendera yang terlihat di salah satu kawasan kota dan diklaim oleh umat Muslim sebagai bendera RMS sebenarnya adalah panji Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dipimpin tokoh oposisi populer Megawati Soekarnoputri (pada masa itu). Di sisi lain, beberapa orang yang terkait dengan RMS di Belanda berada di Ambon ketika kerusuhan pecah, meskipun tidak jelas apa yang mereka lakukan. Sejak tentara Indonesia menumpas gerakan RMS pada 1950, gerakan itu terutama merupakan gerakan politik di pengasingan tanpa basis massa yang berarti di Ambon.

Setiap 25 April, pada peringatan proklamasi Republik Maluku Selatan tahun 1950, beberapa bendera RMS dikibarkan, terutama di Pulau Saparua. Pemerintah Soeharto—yang mengeksekusi pemimpin republik yang berumur pendek itu pada 1966—secara rutin menangkap para pengibar bendera, tetapi para simpatisan RMS tidak pernah dianggap sebagai ancaman serius, dan sejak akhir 1950-an gerakan tersebut tidak memiliki kekuatan gerilya yang sebanding dengan yang ada di Timor Timur, Irian Jaya, atau bahkan Aceh. Ironisnya, kekerasan yang terus berlangsung telah menjadi dorongan besar bagi gerakan itu, baik dalam hal perhatian internasional maupun kemungkinan meningkatnya dukungan di Ambon dari sebagian orang Kristen yang memandang unsur sipil dan militer pemerintah Indonesia sebagai pihak yang bermusuhan. Namun, tuduhan Muslim bahwa orang-orang Kristen di Ambon mendapat dukungan RMS memiliki arti penting. Tuduhan itu memperkuat dan memperdalam kepahitan di desa-desa Muslim Ambon yang dihancurkan pasukan RMS pada 1950. Tuduhan itu memberi alasan bagi seruan mengangkat senjata di pihak Muslim karena menyiratkan bahwa pihak Kristen diorganisasi, dilatih, dan diperlengkapi oleh kekuatan luar yang setidaknya pada masa lalu mempunyai kemampuan militer; banyak anggota RMS pada 1950 merupakan orang Ambon yang pernah bertugas dalam KNIL, tentara kolonial Belanda. Tuduhan itu juga menimbulkan kesan bahwa orang-orang Kristen didukung Barat, mengingat basis RMS di Belanda, dan tidak setia, karena RMS pernah berperang melawan kemerdekaan Indonesia dan berusaha mempertahankan hubungan dengan mahkota Belanda. Siapa pun yang ingin mengobarkan konflik di Ambon dapat dengan mudah melakukannya dengan memainkan isu RMS.

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK AMBON

Akhirnya masyarakat Maluku menyadari bahwa mereka sudah lelah bertempur, berbagai upaya untuk mengakhiri konflik pun segera dilakukan, beberapa orang yang terlibat dalam upaya perdamaian yakni dari petugas keamanan, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dua pendekatan upaya dalam penyelesaian konflik di Maluku yakni yang pertama dalam bentuk pendekatan keamanan dan darurat, yang kedua yakni dalam bentuk pendekatan pemulihan dan pembangunan. Namun sayangnya tidak ada strategi serta perencanaan jangka panjang baik dari pemerintah maupun dari masyarakt sipil, pendekatan penyelesaian konflik yang pertama yakni mengandalkan pihak militer yang didatangkan dari luar daerah Maluku. Sementara itu pemerintah pusat memulai perundingan damai antara kelompok Muslim dan Kristen pada Februari 2002. Sebelum pemerintah mengadakan perundingan damai pada Februari 2002, ada beberapa upaya perdamaian dari pemerintah yang tidak berhasil. Salah satunya yakni Gubernur Maluku membentuk satuan “Tim 6” yang terdiri dari masing- masing pemimpin agama, tugas mereka yakni menghentikan adanya kekerasan yang terjadi di Ambon dan mencegah terjadinya penghancuran symbol-symbol keagamaan seperti gereja dan masjid, juga mencegah terjadinya penghancuran rumah- rumah warga.

Mereka dibentuk untuk berkomitmen dalam upaya perdamaian, tetapi sayangnya hal ini justru sebaliknya, mereka diduga terlibat dalam kekerasan. Bentukan "Tim 6" tadi tidak berpengaruh dalam upaya perdamaian. Alhasil perdamaian yang ditempuh dengan cara seperti ini pun gagal. Sementara itu, bantuan yang diberikan pemerintah juga bermasalah. Tidak adanya dukungan dari militer dalam mendistribusikan bantuan, akhirnya persediaan makanan dan kebutuhan lainnya pun tidak dapat dibagikan. Di sisi lain, militer tidak mendapatkan dukungan logistik yang cukup. Adanya pemisahan antara kelompok Kristen dan Muslim juga menjadi tantangan untuk pendistribusian bantuan. Dengan adanya hal ini, membuat pemerintah lebih terdorong untuk menanggapi kasus kekerasan yang berkembang di Maluku. Sampai pada akhirnya pemerintah pusat pun memimpin proses perdamaian. Pada 11 Februari 2002 di pegunungan Malino Sulawesi Selatan terjadilah penandatanganan Perjanjian Damai Malino II. Ada dua tokoh negara pada saat itu ikut andil di dalamnya, beberapa tokoh negara tersebut yakni: Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kordinator Urusan Politik, Hukum, serta Jusuf Kalla, Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat. Atas perintah dari Jusuf Kalla, Gubernur Maluku memilih perwakilan dari masing- masing kelompok (Muslim dan Kristen), 35 dari komunitas Muslim, dan 34 dari komunitas Kristen, 69 orang tersebut lalu berkumpul di Malino selama tiga hari. Hingga pada akhirnya mereka melakukan penandatanganan Perjanjian Damai Malino II. Namun, harus diakui bahwa pasca penandatanganan, yang dilakukan pemerintah pusat pada ssat itu dalam mengatasi konflik Ambon adalah melalui Perjanjian Malino II, padahal yang sebenarnya hingga kini perjalanan Perjanjian Malino II justru ditinggalkan pemerintah. Di sini bisa dilihat bahwa peran negara dalam menangani konflik Ambon sangat minim. Oleh sebab itu, Ketika ada bentrokan Kembali, pendekatan pasca peperangan yang dilakukan pemerintah yakni dengan adanya penambahan pasukan Brimob dan TNI.

TANGGAPAN APARAT KEAMANAN

Sejak 19 Januari 2002, ketika kekerasan pertama kali meletus, hingga 14 Februari 2002, ketika aparat keamanan turun tangan dalam bentrokan di Pulau Haruku, militer mendapat kritik keras karena gagal mencegah serangan terhadap penduduk desa dari kedua agama. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia menyatakan bahwa militer lamban dalam merespons, dan tuduhan pertama mengenai keberpihakan aparat keamanan muncul berdasarkan sikap tidak bertindak mereka. Pada pertengahan Februari, kedua pihak menuduh militer secara aktif membantu salah satu pihak menyerang pihak lain atau hanya menembaki salah satu pihak yang terlibat dalam bentrokan. Sekilas, Ambon tampaknya tidak kekurangan personel. Terdapat tiga kompi dari Batalyon Infanteri Angkatan Darat 733, Batalyon Pattimura, yang markasnya terletak secara strategis di sepanjang jalan utama di pulau tersebut. Komando resor militer, KOREM 174, bermarkas di Ambon, dan terdapat pula komando distrik militer, KODIM, serta beberapa pos militer tingkat kecamatan. Satu kompi Brigade Mobil kepolisian (Brimob) juga ditempatkan di Ambon.

Namun, berbagai laporan tentang pertempuran di Batu Merah dan wilayah lain di Kota Ambon pada 19–20 Januari 2002 menunjukkan bahwa angkatan darat dan kepolisian sama-sama kekurangan personel dan sama sekali tidak siap menghadapi kekerasan tersebut. Kenyataan bahwa kekerasan meletus pada masa Lebaran berarti banyak prajurit sedang cuti. Selain itu, pada 14 Januari 2002, banyak prajurit dari Ambon telah dikirim sebagai bala bantuan untuk membantu meredakan pecahnya kekerasan di Dobo yang berdekatan, sehingga kekuatan inti aparat teritorial di kota itu berkurang.

Warga mencatat keberadaan polisi ketika massa mulai mengamuk di sejumlah bagian Kota Ambon, tetapi polisi tidak mampu berbuat banyak. Tembakan peringatan oleh satu atau dua anggota polisi tidak berdampak pada kerumunan yang berjumlah ratusan, bahkan ribuan orang. Walaupun komunitas Muslim maupun Kristen menuduh bahwa tidak bertindaknya militer menguntungkan pihak lain, sulit untuk menyatakan adanya keberpihakan komunal pada minggu-minggu pertama tersebut. Umat Muslim hanya memperoleh sedikit bantuan ketika permukiman mereka dibakar selama dua hari pertama konflik. Umat Kristen menyebut tidak bertindaknya militer sebagai penyebab kehancuran Desa Benteng Karang pada 20 Januari dan kekerasan berikutnya pada hari yang sama di Desa Nania. Umat Muslim berusaha meminta pertolongan ketika mereka diserang di Kamiri, Hative Besar, pada 20 Januari, tetapi tidak seorang pun menjawab telepon di ketiga pos militer yang mereka hubungi. Ketika warga mendatangi para komandan secara langsung, seperti di Passo, jawabannya adalah bahwa berbagai pos kekurangan personel atau mereka tidak memiliki perintah untuk turun tangan. Alasan terakhir ini tidak dapat dibenarkan ketika nyawa manusia berada dalam bahaya.

Dalam hitungan hari, persepsi masyarakat setempat terhadap aparat keamanan telah berubah. Pada 23 Januari, empat hari setelah pertempuran meletus, pasukan tambahan KOSTRAD dikirim ke Ambon dari Ujung Pandang. Banyak prajurit yang dikirim berasal dari etnis Bugis dan Makassar, sehingga umat Kristen secara otomatis menganggap mereka berpihak kepada pihak Muslim. Persepsi mengenai keberpihakan tersebut diperkuat oleh kenyataan bahwa Mayor Jenderal Suaidi Marasabessy, kepala komando daerah yang bermarkas di Ujung Pandang, sendiri merupakan seorang Muslim Ambon. Marasabessy sendiri mengakui adanya persepsi keberpihakan tersebut dan mengatakan kepada pers pada 11 Maret bahwa, karena umat Kristen percaya sebagian besar anggota KOSTRAD adalah orang Bugis yang bertempur bersama saudara-saudara Muslim mereka, ia telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan mereka tidak berada di garis depan (Pernyataan ini agak tidak terus terang karena dua alasan: pasukan KOSTRAD memang telah berada di garis depan sejak kedatangan mereka di Ambon, dan pada Maret mereka menjaga pos-pos militer di seluruh kota, tempat tidak mungkin mereka berada di belakang garis depan pihak lain). Namun, dengan adanya bala bantuan, militer pada umumnya menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan mematikan hingga kekerasan di Haruku pada 14 Februari.

Sejak saat itu, jumlah korban tewas meningkat tajam, demikian pula tuduhan keberpihakan. Secara umum, umat Kristen menuduh angkatan darat berpihak kepada umat Muslim, sedangkan umat Muslim menuduh polisi membantu umat Kristen, meskipun umat Kristen juga menuduh sejumlah perwira Muslim secara pribadi berpihak kepada umat Muslim. Kenyataannya, di kedua pihak, polisi setempat mungkin berpihak kepada kelompok mereka sendiri. Mayor Jenderal Marasabessy mengakui hal ini ketika ia mengatakan bahwa mulai 9 Maret, pasukan setempat diperintahkan kembali ke barak. Pencegahan konflik akan menjadi tanggung jawab pasukan dari luar Maluku. Masalah keberpihakan pasukan setempat telah didiagnosis dengan tepat. Sebagai contoh, ketika pasukan tambahan dikirim ke Pulau Haruku untuk mencoba mencegah konflik antara umat Muslim Pelauw dan umat Kristen Kariu, umat Kristen segera mencatat bahwa komandan pasukan tambahan tersebut adalah seorang Muslim Ambon, demikian pula dua prajurit yang ditempatkan di sebuah pos di Kariu; salah seorang di antaranya menikah dengan perempuan dari Pelauw. Ketika pos itu dipindahkan dari Kariu tidak lama sebelum penduduk desa Muslim menyerang, angkatan darat mengatakan bahwa telah ada keputusan dari atasan untuk menggabungkan semua pos yang berbeda menjadi satu, tetapi umat Kristen menafsirkannya sebagai upaya yang disengaja untuk membiarkan Kariu tanpa pertahanan. Demikian pula, ketika polisi melepaskan tembakan ke arah umat Muslim pada 1 Maret, sumber-sumber Muslim menyebarkan nama beberapa polisi Kristen yang menurut mereka terlibat dalam serangan itu. Dari nama-nama yang beredar, seorang polisi ditahan setelah para saksi mengidentifikasinya sebagai orang yang telah menembakkan senjatanya. Sumber-sumber Kristen mengatakan bahwa rumahnya telah dibakar habis pada pagi hari itu, dan mereka tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa ia telah menembaki kerumunan massa.

Diperlukan waktu hampir dua bulan bagi para komandan senior militer untuk menyadari bahwa tidak seorang pun, termasuk anggota aparat keamanan, kebal terhadap kanker komunalisme. Namun, bahkan ketika itu, penyelesaiannya belum jelas. Ketika sumber-sumber Kristen pertama kali mulai mempertanyakan pasukan KOSTRAD, mereka merekomendasikan agar hanya pasukan setempat dari Maluku yang dikerahkan untuk mencoba meredakan kekerasan. Setidaknya dengan demikian, kata mereka, mereka dapat merasa yakin bahwa pasukan setempat memahami budaya lokal. Namun, ketika sudah sangat jelas bahwa orang Ambon bertempur melawan sesama orang Ambon, timbul pertanyaan bagaimana pemahaman terhadap budaya Ambon dapat membuat pasukan setempat lebih mampu menghadapi perang antarkomunitas dibandingkan pasukan dari luar daerah.

AKIBAT KONFLIK

Pada awal Maret, konflik tersebut telah menimbulkan akibat sosial dan politik yang sangat besar. Konflik itu telah menyebabkan hampir 200 orang meninggal, meskipun kedua pihak sepakat bahwa angka yang tepat sulit ditentukan.

Pemerintah tidak mengeluarkan angka terpisah mengenai korban meninggal dari kalangan Kristen dan Muslim, tetapi jelas bahwa keduanya mengalami kerugian yang sangat besar berupa korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan harta benda, termasuk rumah, tempat usaha, dan tempat ibadah. Selain itu, puluhan ribu orang terpaksa mengungsi dan membutuhkan bantuan. Perpecahan antara kedua komunitas telah menjadi begitu dalam sehingga para politisi setempat mengusulkan pemisahan sepenuhnya antara Muslim dan Kristen sebagai penyelesaian konflik, meskipun semua orang menyadari bahwa hal itu mustahil dilakukan. Secara politik, konflik tersebut telah mempertajam polarisasi antara umat Kristen dan Muslim di bagian-bagian lain Indonesia, terutama di kalangan elite politik Jakarta, dengan cara yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada bulan Juni. Jumlah pengungsi terus berubah seiring meningkat dan meredanya kekerasan, ketika para pendatang membawa anggota keluarga mereka pulang lalu kembali ke Ambon, dan ketika sebagian keluarga memperoleh tempat pemukiman kembali di daerah setempat. Selain itu, sumber-sumber Muslim dan Kristen cenderung hanya mengumpulkan data tentang pengungsi yang seagama dengan mereka, sehingga data dalam banyak laporan pers setempat menjadi tidak seimbang. Sebagai contoh, data yang dikumpulkan oleh pos komunikasi Muslim di Masjid al-Fatah mencatat total 14.540 pengungsi di 26 lokasi berbeda, sebagian besar berupa pos militer atau masjid. Data yang dikumpulkan beberapa hari kemudian oleh Tirus (Tim Relawan untuk Kemanusiaan), sebuah organisasi yang sebagian besar anggotanya beragama Kristen, mencatat 7.923 pengungsi di sebelas lokasi berbeda, termasuk pos militer, gereja, dan sekolah agama. Hanya empat lokasi yang tercantum dalam kedua sumber tersebut. Tidak satu pun sumber itu mencatat orang-orang yang mengungsi ke pulau-pulau lain, padahal jumlahnya banyak. Pecahnya kekerasan di Haruku menyebabkan 1.243 orang mengungsi dari Kariu saja, dan setelah pertempuran di Ambon pada 23–25 Februari, jumlah pengungsi di kompleks Masjid al-Fatah meningkat dua kali lipat menjadi hampir 4.000 orang (sebagian besar telah dipindahkan ke lokasi lain pada awal Maret).

Pada awal Maret, persoalan utama bantuan kemanusiaan, terutama makanan dan obat-obatan, bukanlah ketersediaannya, melainkan penyalurannya setelah bantuan tiba di Ambon, khususnya karena adanya pemblokiran jalan dan kesulitan keamanan lainnya. Pemerintah daerah telah menghalangi lembaga-lembaga internasional untuk memberikan bantuan, dan sebagian besar bantuan yang masuk berasal dari sumber-sumber yang berkaitan dengan salah satu pihak dalam konflik di tempat-tempat penampungan yang memaksa pengungsi dari kedua komunitas hidup berdampingan, seperti barak angkatan udara yang kami kunjungi di Suli, Ambon, hubungan antar-mereka dikatakan sebaik yang dapat diharapkan. Namun, ketika sejumlah besar pengungsi dari satu komunitas berkumpul di satu lokasi, seperti pengungsi Muslim di Masjid al-Fatah atau pengungsi Kristen di Gereja Silo yang berdekatan, pemusatan korban kekerasan tampaknya meningkatkan sikap militan mereka, sebagaimana kamp-kamp pengungsi sering menjadi tempat perekrutan kelompok-kelompok kekerasan. Faktor itu mungkin turut menyebabkan pecahnya kekerasan di Ambon pada 23–25 Februari dan pada awal Maret.

Upaya pemerintah menangani persoalan pengungsian tidak diragukan lagi didasari niat baik, tetapi keliru arah. Human Rights Watch memperoleh salinan kuesioner yang dibagikan kepada orang-orang yang mengungsi akibat konflik. Kuesioner yang diberikan kepada kepala keluarga itu berisi dua belas pertanyaan. Satu-satunya pertanyaan yang berkaitan dengan anak-anak menanyakan tingkat kelas sekolah mereka, sehingga tidak menyediakan kesempatan untuk mencatat jumlah bayi, anak usia prasekolah, atau anak yang tidak bersekolah di tempat-tempat penampungan. Pada pertanyaan nomor 10 tentang harta benda, responden diminta melingkari pilihan "Tidak ada yang tersisa" atau "Masih ada sebagian", yang nilai analitisnya tidak jelas. Yang paling bermasalah adalah pertanyaan nomor 11, "Keinginan kepala keluarga". Responden diminta memilih antara "Kembali ke tempat asal" atau "Bermukim kembali/bertransmigrasi". Tidak ada upaya untuk mengetahui kondisi yang memungkinkan suatu keluarga pengungsi bersedia kembali ke desanya. Mengingat para pengungsi kemungkinan masih mengalami trauma akibat pengungsian dan tidak lagi memiliki rumah untuk ditempati, besar kemungkinan bahwa jika hanya diberi dua pilihan tersebut, mereka akan memilih bertransmigrasi (pindah ke pulau lain). Namun, tanpa informasi lengkap mengenai kondisi di lokasi transmigrasi, yang sering kali sangat berat, atau ketersediaan pilihan alternatif, "pilihan" tersebut mungkin tidak lebih dari pemukiman kembali secara paksa. Banyak pendatang Bugis dan Buton, setidaknya untuk sementara, memilih kembali ke Sulawesi, dan hal itu terlihat dalam banyak foto pers internasional yang memperlihatkan orang-orang berdesakan di kapal dan feri antarpulau. Akan tetapi, para pengungsi asal Ambon, baik Kristen maupun Muslim, tidak memiliki kampung halaman lain untuk mereka tuju.

Akibat Politik: Kekerasan di Ambon merupakan satu lagi contoh kerusakan yang ditimbulkan oleh penghancuran lembaga-lembaga politik oleh Orde Baru. Seandainya tersedia saluran politik untuk menampung keluhan kedua pihak ketika keluhan itu muncul selama sepuluh tahun terakhir, ledakan kekerasan selama tiga bulan terakhir mungkin dapat dihindari. Dalam keadaan sekarang, mungkin diperlukan waktu bertahun-tahun, bahkan beberapa generasi, untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Kekerasan tersebut telah melemahkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga sipil. Wakil ketua parlemen provinsi telah menyerukan agar Ambon memiliki komando daerah militer (KODAM) sendiri, guna menambah jumlah pasukan yang ditempatkan secara permanen di wilayah itu. Penduduk di daerah-daerah yang telah dihancurkan atau dibakar habis menginginkan perlindungan dan keamanan, meskipun pada saat yang sama mereka menuduh militer dan polisi berpihak. Pihak yang mungkin memperoleh keuntungan dari keinginan tersebut adalah angkatan darat. Kekerasan itu kemungkinan akan menimbulkan dampak mendalam dan berkepanjangan terhadap hubungan Muslim–Kristen di Indonesia secara lebih luas. Penembakan di dekat masjid memicu demonstrasi besar-besaran oleh kelompok-kelompok pemuda Muslim di seluruh negeri, dan pada 7 Maret beberapa organisasi yang lebih konservatif mulai mendaftarkan sukarelawan untuk bergabung dalam perang suci guna membela Islam di Ambon.

Jika hal itu terjadi, dukungan di kalangan umat Kristen bagi pembentukan negara tersendiri mungkin akan meningkat. Situasi di Ambon juga dapat memperkuat organisasi-organisasi Muslim garis keras menjelang pemilihan umum nasional pada bulan Juni, yang pada gilirannya menimbulkan ketakutan di kalangan umat Kristen, bukan hanya di Ambon tetapi juga di tempat lain, mengenai kedudukan mereka di Indonesia pasca-Soeharto. Lebih daripada insiden komunal lainnya yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, "perang saudara di Ambon telah meruntuhkan gagasan tentang Indonesia sebagai masyarakat yang toleran terhadap semua agama".

EPILOG

Pada tanggal 19 Januari 1999, ketika umat Islam di seluruh dunia sedang merayakan berakhirnya bulan puasa, terjadi perkelahian di Pulau Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia, antara seorang pengemudi angkutan umum beragama Kristen dan seorang pemuda Muslim. Perkelahian semacam itu merupakan kejadian yang biasa terjadi, tetapi kali ini berkembang menjadi perang antara umat Kristen dan Muslim. Sebagian besar wilayah pusat Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, serta banyak permukiman (kampung) di bagian lain Pulau Ambon dan pulau-pulau sekitarnya, seperti Seram, Saparua, Manipa, Haruku, dan Sanana, telah hangus terbakar. Sekitar 30.000 orang terpaksa mengungsi akibat konflik tersebut, dan jumlahnya terus berubah. Hingga awal Maret, jumlah korban meninggal telah jauh melampaui 160 orang dan terus meningkat dengan cepat ketika pasukan tambahan militer yang dikerahkan untuk memulihkan ketertiban mulai menembaki para perusuh yang dipersenjatai senjata tajam dan bom rakitan. Kepala pusat dokumentasi Kristen di Ambon mengatakan kepada Human Rights Watch melalui telepon pada tanggal 10 Maret bahwa sebanyak 83 orang Kristen telah terbunuh antara tanggal 19 Januari dan 9 Maret 1999, dengan 23 orang di antaranya tewas di tangan aparat militer. Nur Wenno, kepala kegiatan bantuan bagi umat Muslim di masjid terbesar di Ambon, mengatakan bahwa tidak ada angka pasti mengenai jumlah korban meninggal dari pihak Muslim, tetapi jumlahnya telah melampaui 100 orang. Pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kekerasan di Ambon dan pulau-pulau sekitarnya berpusat pada tiga persoalan: Siapa yang memulainya? Mengapa kekerasan tersebut meningkat begitu cepat? Apa yang sebenarnya dapat dilakukan pemerintah untuk menghentikannya? Dan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah sekarang? Pers Indonesia, para pejabat tinggi pemerintah Indonesia dan pemimpin oposisi, serta banyak diplomat yang berkedudukan di Jakarta meyakini bahwa kekerasan tersebut sengaja diprovokasi sebagai bagian dari strategi nasional yang dijalankan oleh sejumlah perwira militer yang bertindak di luar kendali. Strategi tersebut bertujuan mengacaukan pemilihan umum parlemen yang akan diselenggarakan pada bulan Juni dan menciptakan kondisi yang memungkinkan kembalinya pemerintahan militer. Pemilihan umum bulan Juni, yang diperkirakan akan menjadi pemilihan umum paling bebas di Indonesia sejak tahun 1955, hampir pasti akan semakin mengurangi kekuasaan militer apabila dilaksanakan secara adil. Kekuasaan militer sendiri telah mengalami kemunduran sejak Presiden Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998.

Para pemimpin lokal di Ambon cenderung memandang kekerasan tersebut sebagai tindakan yang dipicu secara lokal untuk mencapai tujuan-tujuan komunal yang sempit. Dalam kedua kemungkinan tersebut, pemerintahan Habibie, pengganti Soeharto, tampaknya tidak menunjukkan kesungguhan dalam menyelidiki berbagai tuduhan mengenai adanya provokasi, baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Mengapa kekerasan tersebut menyebar begitu cepat? Ambon digambarkan oleh media Indonesia sebagai wilayah yang hubungan antara umat Kristen dan Muslim selalu berlangsung harmonis, dengan ketenteraman hubungan antaragama dilindungi oleh suatu sistem persekutuan yang disebut pela. Dalam sistem tersebut, selama berabad-abad, sebuah desa yang menganut satu agama menjalin hubungan persaudaraan dengan desa yang menganut agama lain, sehingga umat Kristen membantu pembangunan masjid dan umat Muslim membantu pembangunan gereja. Kenyataannya sangat berbeda. Ketegangan antara kedua komunitas, yaitu masyarakat Ambon beragama Kristen di satu pihak serta masyarakat Ambon beragama Islam dan umat Muslim dari berbagai kelompok pendatang di pihak lain, telah mencapai tingkat yang sedemikian tinggi sehingga provokasi kecil saja sudah cukup untuk memicu ledakan kekerasan. Setelah kekerasan dimulai, konflik tersebut dengan cepat berkembang dan memperburuk dirinya sendiri, mengungkit kembali berbagai keluhan historis, menimbulkan penderitaan baru, serta melahirkan kecurigaan antarkomunitas yang baru dan sangat mendalam.

Apa yang seharusnya dapat dilakukan pemerintah secara berbeda? Salah satu persoalan utama berkaitan dengan penggunaan kekuatan mematikan. Konflik di Ambon dapat dibagi menjadi dua tahap yang berbeda, dengan titik pemisah berupa keputusan untuk menembaki para demonstran. Sejak tanggal 19 Januari hingga sekitar 14 Februari, sebagian besar korban meninggal di kedua belah pihak disebabkan oleh senjata tradisional atau senjata rakitan, seperti parang, pisau panjang, tombak, anak panah yang ditembakkan menggunakan ketapel, bom molotov, dan bom ikan (perangkat ilegal yang diledakkan di bawah air untuk menangkap ikan dalam jumlah besar). Banyak orang juga meninggal karena terbakar ketika rumah atau kendaraan dibakar. Sejak tanggal 14 Februari dan seterusnya, sebagian besar kematian terjadi ketika aparat keamanan, yang jumlahnya pada bulan Maret telah meningkat menjadi 5.000 personel di sebuah pulau berpenduduk sekitar 350.000 jiwa, mulai melaksanakan perintah untuk menembak di tempat. Tidak diragukan bahwa terdapat ancaman keamanan yang sangat serius, dan pada awalnya aparat keamanan dituduh oleh kedua belah pihak hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa pun ketika masing-masing kelompok saling menyerang. Ketika aparat keamanan akhirnya melakukan intervensi, mereka menggunakan peluru tajam, bukannya mencoba menerapkan metode pengendalian massa yang tidak mematikan. Persoalan kedua berkaitan dengan komposisi aparat keamanan yang dikerahkan. Kedua belah pihak telah mengajukan tuduhan mengenai keberpihakan, dengan pihak Muslim cenderung menuduh polisi berpihak kepada umat Kristen, sedangkan pihak Kristen cenderung menuduh tentara berpihak kepada umat Muslim.

Tuduhan mengenai keberpihakan tersebut sebagian didasarkan pada atribut nonmiliter dari para tentara dan polisi yang terlibat (asal geografis, agama, dan etnisitas), tetapi juga pada perilaku mereka di lapangan. Dalam satu kasus, pihak Muslim menuduh polisi Kristen melepaskan tembakan di dekat sebuah masjid; sementara dalam kasus lainnya, pihak Kristen menuduh tentara Muslim membantu umat Muslim menyerang sebuah desa Kristen. Tuduhan-tuduhan tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh oleh suatu badan yang tidak memihak. Selain itu, pemerintah seharusnya mengerahkan aparat keamanan dengan mempertimbangkan upaya untuk meminimalkan persepsi mengenai keberpihakan.

Dua persoalan pertama berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia dalam situasi konflik internal. Namun, terdapat persoalan ketiga mengenai respons pemerintah, yang juga muncul dalam berbagai peristiwa kekerasan antarkomunitas lainnya, seperti konflik etnis serius yang meletus di Kalimantan Barat pada akhir 1996 dan awal 1997. Persoalan tersebut berkaitan dengan keyakinan pemerintah Indonesia terhadap penyelesaian konflik melalui pendekatan dari atas ke bawah (top-down conflict resolution), yaitu bahwa apabila pemerintah daerah mempertemukan para pemimpin agama atau tokoh adat dan meminta mereka menandatangani perjanjian perdamaian atau berpartisipasi dalam suatu upacara adat, konflik dapat diselesaikan. Pendekatan ini dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak menguntungkan karena ketika perjanjian tersebut akhirnya gagal dipertahankan, para peserta sering kali meyakini bahwa kegagalan itu disebabkan oleh iktikad buruk salah satu pihak, sehingga ketidakpercayaan dan kecurigaan timbal balik semakin mendalam. Konflik di Ambon juga telah menyebabkan puluhan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Human Rights Watch mengkhawatirkan bahwa pemerintah provinsi, yang telah berupaya semaksimal mungkin menyediakan tempat penampungan darurat bagi para pengungsi, mungkin terlalu terburu-buru memutuskan bahwa transmigrasi, yaitu pemukiman kembali para pengungsi di pulau-pulau lain, merupakan solusi jangka panjang yang paling tepat bagi persoalan tersebut.

Kedamaian dan keamanan yang kini dinikmati masyarakat Maluku setelah porak poranda pascakonflik 27 tahun lalu perlu terus dirawat. Pimpinan agama dan adat harus senantiasa membekali diri dengan pengetahuan resolusi konflik dan pemahaman keagamaan yang kontekstual. Keberhasilan masyarakat Maluku dalam menuntaskan konflik sosial salah satunya berasal dari revitalisasi nilai budaya yang dianut warga jauh sebelum kerusuhan pecah. Budaya persaudaraan antarkelompok masyarakat dan desa dalam sistem pela gandong menjadi inspirasi perdamaian. Berkaca pada budaya ratusan tahun tersebut, banyak kelompok masyarakat Maluku menjalin hubungan persaudaraan antardesa, tanpa melihat latar belakang agama. Nilai persaudaraan inilah yang menjadi pijakan untuk mempertemukan kelompok yang tercerai-berai. Sistem pela gandong umum ditemui di wilayah Ambon, Maluku Tengah, hingga Pulau Seram. Sistem persaudaraan ini juga dipegang di wilayah lain di Maluku dengan nama berbeda, salah satunya kalwedo di Maluku Barat Daya.

Banyak orang yang menyebut konflik di Maluku baru akan bisa reda dalam waktu 50 tahun, tetapi ternyata lebih cepat dari itu karena masyarakat punya modal sosial perdamaian yang kuat. Raja-raja berperan sebagai motor penggerak resolusi konflik. Kerusuhan bisa terjadi karena ulah beberapa provokator yang terus menyebarkan kabar bohong Selain pendekatan adat, pendekatan keagamaan pun ditempuh sebagai upaya penyelesaian konflik. Pimpinan agama diminta berani melakukan otokritik dan mulai mengajarkan peace sermon atau khotbah perdamaian. Para pendeta kita minta tinggal beberapa waktu di rumah umat Islam, ustaz juga tinggal di rumah umat Kristen. Tidak mudah melakukan ini karena banyak ditentang, tetapi perlu keberanian untuk mewujudkan perdamaian. Meski Konflik Maluku 1999 bukan dinyatakan sebagai konflik agama, peran agama dalam berkembangnya konflik tetap sentral. "Tidak mudah untuk menyelesaikan konflik, tetapi perlu keberanian untuk menciptakan kedamaian".

Catatan:

1. Materi utama penulisan artikel ini merupakan terjemahan dan editan Laporan Human Rights Watch: The Violence in Ambon 1999, mendokumentasikan pecahnya konflik komunal antara umat Kristen dan Muslim Ambon, Maluku, yang dimulai pada 19 Januari 1999, ditambah referensi lainnya.

2. Resolusi konflik adalah proses penyelesaian perselisihan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih melalui pendekatan damai, dengan tujuan mengatasi penyebab utama konflik, menghentikan kekerasan, membangun kembali kepercayaan, dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Jakarta, 18 Oktober 2026

Referensi:

1. Regional Dynamics of the Indonesian Revolution: Unity from Diversity, Edited by Andrey R. Kahin, University of Hawaii Press, 1985
2. Report of Human Rights Watch: The Violence in Ambon, March 1999
3. Pengelolaan Konflik di Indonesia – Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso, LIPI, Juni 2011
4. A Religious Conflict in Indonesia: A Case Study of Maluku, Wa Ode Nahla Nurhidayah, Graduate Institute of Applied Linguistics, June 2017
5. Kebijakan Pemerintah Menangani Konflik Agama di Maluku, Samsudin Buanana B, Jurnal Hukum dan Ekonomi Vol: 06 No 2, Edisi Desember 2020
6. 25 Tahun Konflik Maluku, Pedamaian Terus Dirawat, Raynard Kristian Bounanio Pardede, Editor: Siwi Yunita Cahyaningrum, Politik & Hukum, January 23, 2024
7. Sebab-sebab Utama dan Sebab-sebab Pemicu Faktor Sosial, Budaya dalam Konflik Etnis di Maluku, Politics and Humanism, Vol 3 Issue 1, 2024
8. Indonesian Invasion of Ambon, and the Limits of Revolutions, Rafi Yahya, Pacific Arocities Education, San Fransisco, October 20, 2024